



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 kurang memenuhi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -

Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 3 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 71 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf mempunyai tugas membantu Wali Kota Blitar dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Oleh karenanya Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar.

Dalam rangka melaksanakan tugas diatas perlu kiranya disusun dokumen perencanaan yang dapat memberikan gambaran dukungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar. Rencana Strategis yang disusun merupakan rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja dari Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar.

Berkenaan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Tahapan ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dan dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Blitar Nomor 188/12/410.020.6/2021 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.
- 2) Melaksanakan Orientasi berkenaan dengan Rencana Strategis guna menyamakan persepsi serta memberikan pemahaman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.
- 3) Tim Penyusun sebagaimana telah ditetapkan sesuai angka 1, menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.
- 4) Masing masing kelompok kerja menghimpun dan menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar.

b. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal

RPJMD Kota Blitar yang mencakup analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur, analisis isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja. Penyusunan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 050/288/410.202.2/2021 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

- c. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan awal RENSTRA SETDA yang disusun berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Blitar Nomor 050/2082/410.202.2/2021 Perihal Penyusunan Rancangan Renstra/Penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar, Perwakilan Bappeda Kota Blitar dan Perangkat Daerah terkait. Pada forum ini dilaksanakan pembahasan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerjanya. Setelah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- e. Perumusan rancangan akhir
Tahapan ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah disusun guna mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- f. Penetapan.
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Wali Kota Blitar melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan Dengan Peraturan Wali Kota Blitar.

g. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026

Seiring dengan adanya perubahan regulasi terkait penataan kelembagaan perangkat daerah, penyederhanaan birokrasi serta pemutakhiran nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan pemetaan klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan terkait DAK tahun anggaran 2022 DBHCHT, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali terhadap dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
34. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tertanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan pemetaan klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan terkait DAK tahun anggaran 2022 DBHCHT;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1)

38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Walikota Blitar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 83);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di Urusan Penunjang Sekretariat Daerah.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Urusan Penunjang Sekretariat Daerah.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja (nama OPD)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar
	2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Blitar
	2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Blitar
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar

Sekretariat Daerah Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 3. Bagian Hukum, membawahi :
- c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi;
 2. Bagian Organisasi, membawahi:
 3. Bagian Umum, membawahi:

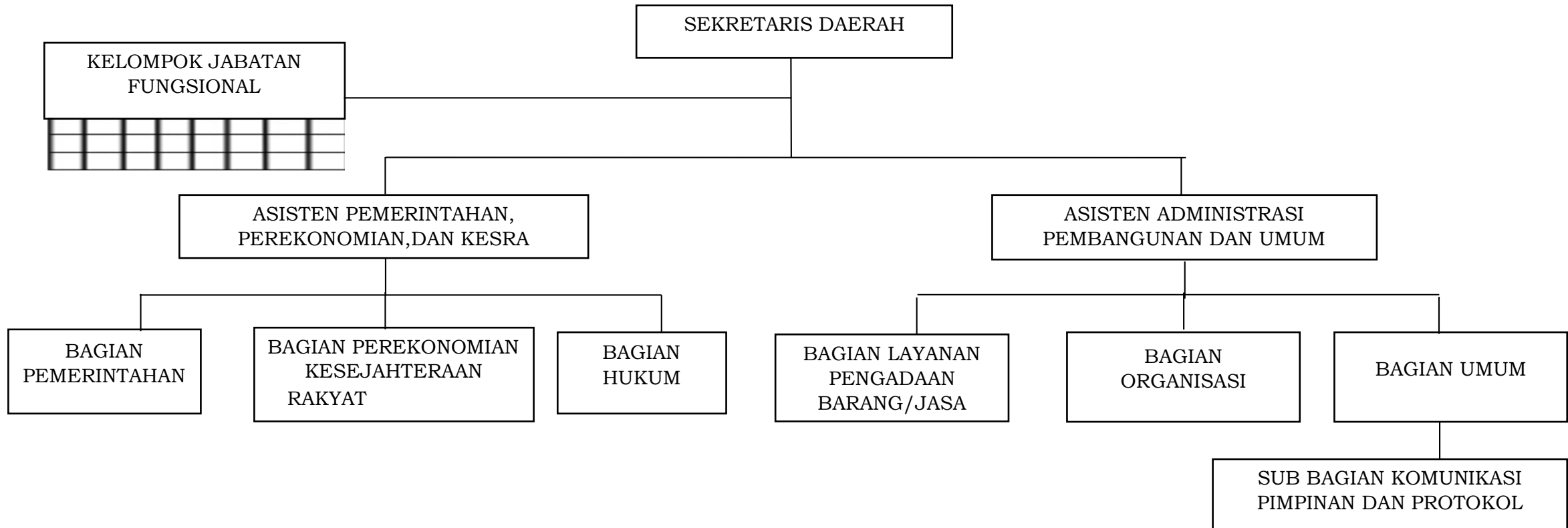
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana pada Bagan 2.1. Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Blitar. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk menjelaskan tugas dimaksud, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.

Bagan 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi dan pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, transmigrasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pendidikan, kesehatan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, koperasi dan UKM, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan urusan penunjang kepegawaian dan sumber daya manusia, pengawasan serta BUMD dan koordinasi kerukunan umat beragama.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum serta perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Bagian Hukum.

Adapun tugas dari masing masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama. Untuk menjalankan tugas dimaksud Bagian Pemerintahan melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan, sub bagian administrasi kewilayahan dan sub bagian otonomi daerah dan kerja sama;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kecamatan dan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
5. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah;
6. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama;
9. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama; dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dimaksud, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perekonomian, sub bagian bina mental spiritual dan sub bagian kesejahteraan sosial dan masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, sosial, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, transmigrasi, perlindungan perempuan dan anak, keluarga berencana, koperasi dan UMKM, pemuda dan olah raga, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, ESDM, perdagangan, dan perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris Daerah;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
7. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Dalam menjalankan tugas dimaksud Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum dan sub bagian dokumentasi dan informasi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, fasilitasi serta pengendalian sekaligus melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah daerah pada Bagian Umum, Bagian Organisasi, dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, ESDM, dan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan serta fasilitasi pimpinan dan forum pimpinan daerah.

Dalam menjalankan tugas dimaksud Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dan umum;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang administrasi pembangunan, layanan pengadaan barang/jasa, organisasi, umum, yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum dibantu oleh:

- a. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bagian Organisasi;
- c. Bagian Umum.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan serta menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa. Dalam menjalankan tugas dimaksud Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian penyusunan dan pengendalian program, sub bagian pengadaan barang / jasa, sub bagian LPSE;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/jasa;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan dan pengendalian

program pembangunan, pengadaan barang / jasa;

6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang/ jasa;
7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan/progres pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Pengoordinasian pendokumentasi kegiatan pembangunan daerah;
9. Pengelolaan pengadaan barang/jasa ;
10. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
11. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
12. Pelaksanaan penugasan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa di lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja/organisasi perangkat daerah atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Pelaksanaan penugasan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog lokal ;
14. Penyusunan dan penyampaian laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Walikota;
15. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan, pengadaan barang dan jasa; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Organisasi;

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan, sub bagian

pelayanan publik dan tata laksana, serta sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kepegawaian, kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi penyelenggaraan urusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
7. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, dan tata usaha pimpinan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pada sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian komunikasi pimpinan dan protokol dan sub bagian tata usaha pimpinan dan keuangan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata

- usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 4. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi penyelenggaraan urusan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol, serta tata usaha pimpinan dan staf ahli; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Blitar

Sumber Daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar terdiri dari Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Blitar.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/aparatur pada Sekretariat Daerah adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	L	P	TOTAL
1	SETDA	4	0	4
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	5	3	8
3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	5	4	9
4	BAGIAN HUKUM	4	5	9
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	9	6	15
6	BAGIAN ORGANISASI	3	5	8
7	BAGIAN UMUM	21	13	34
	JUMLAH	51	36	87

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2022

Tabel 2.2.1.2
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Eselon

NO	URAIAN	ESELON												TOTAL
		II A		IIB		IIIA		IIIB		IVA		IVB		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SETDA	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
4	BAGIAN HUKUM	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	4
6	BAGIAN ORGANISASI	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	4
7	BAGIAN UMUM	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
JUMLAH		1	0	3	0	6	0	0	0	10	8	0	0	28

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2022

Tabel 2.2.1.3
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN												TOTAL
		SD		SLTP		SLTA		DIPLOMA		S1		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SETDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	0	0	1	2	0	0	2	1	2	0	8
3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	2	0	9
4	BAGIAN HUKUM	0	0	0	0	0	2	0	0	4	3	0	0	9
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	0	0	0	0	0	0	1	0	8	5	0	1	15
6	BAGIAN ORGANISASI	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	2	0	8
7	BAGIAN UMUM	1	0	1	0	6	8	3	2	8	3	2	0	34
JUMLAH		1	0	1	0	10	13	4	2	23	20	12	1	87

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2022

Tabel 2.2.1.4
Komposisi Aparatur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	GOLONGAN								TOTAL
		I		II		III		IV		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SETDA	0	0	0	0	0	0	4	0	4
2	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	0	2	4	1	1	0	8
3	BAGIAN PEREKONOMIAN KESRA	0	0	2	0	2	4	1	0	9

NO	URAIAN	GOLONGAN								TOTAL
		I		II		III		IV		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
4	BAGIAN HUKUM	0	0	0	2	3	3	1	0	9
5	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	0	0	1	0	7	6	1	0	15
6	BAGIAN ORGANISASI	0	0	1	1	1	4	1	0	8
7	BAGIAN UMUM	1	0	10	10	9	3	1	0	34
JUMLAH		1	0	14	15	26	21	10	0	87

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagaimana pada table berikut ini:

Tabel 2.2.2.1

Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah

Kode				Nama Bidang Barang	Keadaan Akhir (31 Desember 2021)		
					Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1				ASET	3.826	Buah	96.768.048.681,37
1	3			ASET TETAP	3.631	Buah	95.341.290.352,87
1	3	1		TANAH	14	Buah	45.507.976.000
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	3.259	Buah	30.755.675.618,07
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	31	Buah	17.556.179.034,62
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6	Buah	953.774.100,00
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	321	Buah	567.685.600,18
1	3	6		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	Buah	0,00
1	5			ASET LAINNYA	195	Buah	1.426.758.328,50
1	5	3		ASET TIDAK BERWUJUD	17	Buah	717.080.600,00
1	5	4		ASET LAIN-LAIN	178	Buah	709.677.728,50
TOTAL					3.826		96.768.048.681,37

Sumber : BPKAD Kota Blitar, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar

Capaian kinerja Sekretariat Daerah pada periode Renstra sebelumnya pada periode 2015-2021 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar

[illegible]

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TAR GET NSPK	TAR GET IKK	TARGET INDIKA TOR LAINNYA	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100%	100%
9	Nilai SAKIP Setda	-	-	-	B	B	B	B	B	B	CC	BB	BB	A	A	A	0%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	-	-	-	89%	90%	91%	92%	93%	94%	96,69%	89%	86,36%	92,86%	58,24%	56,79%	109%	99%	95%	101%	63%	60,41%
11	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat dan arsip	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TAR GET NSPK	TAR GET IKK	TARGET INDIKA TOR LAINNYA	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan sarana dan prasarana	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan administrasi keuangan	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumahtang gaan	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan keprotokolan	-	-	-	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	100%	20,00%	20,00%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	100%	20,00%	20,00%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	100%	20,00%	20,00%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	7.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	0%	20,00%	20,00%
2	BELANJA	33.261.132.396	41.026.167.286	41.873.394.310	39.865.168.485	34.984.312.925	45.724.536.241	31.087.392.122	37.407.616.144	36.165.913.696	35.818.734.603	30.618.021.103	41.400.209.534	93%	91%	86%	90%	88%	91%	3,15%	3,28%

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
2.1	BELANJA OPERASI	29.839.856,096	37.170.232,236	39.454.120,570	37.981.314,665	33.661.868,925	40.907.082,641	27.815.432,237	33.927.437,256	33.972.555,076	34.065.473,889	29.373.050,001	36.888.425,882	93%	91%	86%	90%	87%	90%	2,51%	2,44%
2.1.1	Belanja Pegawai	8.288.730,919	7.888.714,500	8.305.742,315	9.649.759,876	9.157.902,497	10.256.971,593	7.765.514,520	6.655.694,022	6.857.300,209	10.361.755,358	8.146.497,643	10.085.674,557	94%	84%	83%	107%	89%	98%	5,67%	11,31%
2.1.2	Belanja Barang	21.551.125,177	29.281.517,736	31.148.378,255	28.331.554,789	24.503.966,428	30.650.111,048	20.049.917,717	27.271.743,234	27.115.254,867	23.703.718,531	21.226.552,358	26.802.751,325	93%	93%	87%	84%	87%	87%	1,78%	0,53%
2.2	BELANJA MODAL	3.421.276,300	3.855.935,050	2.419.273,740	1.883.853,820	1.322.444,000	4.817.453,600	3.271.959,885	3.480.178,888	2.193.358,620	1.753.260,714	1.244.971,102	4.511.783,652	96%	90%	91%	93%	94%	94%	35,02%	35,27%
2.2.1	Belanja Tanah	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.629.908,800	1.961.714,050	2.113.857,740	1.133.487,820	1.211.439,000	4.758.453,600	1.561.500,385	1.637.635,888	1.914.109,620	1.034.101,214	1.136.795,302	4.452.863,743	96%	83%	91%	91%	94%	94%	52,21%	54,51%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.727.500,000	1.696.741,000	180.836,000	615.466,000	80.440,000	59.000,000	1.648.094,500	1.646.053,000	176.694,000	610.793,700	80.260,000	58.919,910	0%	97%	98%	99%	100%	99,9%	7,48%	8,59%

[illegible]

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
3.2	PENGELUARAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
	Pembiayaan Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-33.261.132.396	-41.026.167.286	-41.873.394.310	-39.865.168.485	-34.984.312.925	-45.724.536.241	-31.087.392.122	-37.407.616.144	-36.165.913.696	-35.818.734.603	-30.618.021.103	-41.400.209.534	93%	91%	86%	90%	88%	91%	3,15%	3,28%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah

Tantangan dan peluang dalam mengembangkan pelayanan Sekretariat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		
NO	PELUANG	TANTANGAN
1	Terkoordinasinya antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan bermitra kerja terhadap proses pembangunan sosial, merupakan suatu peluang dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan	Mengingat belum seluruhnya maysarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam proses pembangunan urusan sosial, maka merupakan suatu tantangan untuk mengoptimalkan peran aktif lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan melalui regulasi kebijakan sosial
2	Adanya data-data urusan sosial kemasyarakat yang akurat memberikan kelancaran dalam penyampaian informasi yang cepat dan tepat, serta memudahkan dalam penyusunan kebijakan social	Populasi yang tidak terkendali dapat memicu timbulnya permasalahan sosial, diantaranya meningkatnya jumlah rumah tangga miskin, pencari kerja (pengangguran), dan masalah sosial lainnya
3	Keterlibatan OPD terkait dalam penanganan masalah sosial merupakan peluang dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan guna menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaannya	Merupakan suatu tantangan dalam memadukan data dan informasi, mengingat masing-masing OPD berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang selama ini dijalankan
4	Dinamisnya produk hukum menjamin adanya kepastian hukum bagi pengambil kebijakan di daerah	Pemerintah daerah harus menganalisa dan mengkaji produk hukum sebelum menerapkannya di daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat
5	Teknologi informasi di bidang hukum yang semakin berkembang memudahkan terpublikasinya produk hukum sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat	Tuntutan transparansi kepada Pemerintah Derah sehingga diperlukan kecermaatan dan ketelitian sebelum produk hukum dipublikasikan melalui media yang dapat di akses masyarakat
6	Dinamisnya perkembangan ilmu hukum memudahkan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan bagi permasalahan di daerah yang semakin kompleks	Perlunya penguatan kualitas SDM aparatur bagian hukum sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kualitas analisa hukum sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah
7	Deregulasi media massa dan perkembangan teknologi media	Berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL		
NO	PELUANG	TANTANGAN
	massa menjadikan informasi pemerintahan dan pembangunan semakin mudah diproduksi dan disebarluaskan kepada masyarakat.	Informasi Publik mengharuskan Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik dengan segala hak dan kewajibannya.
8	Semakin menguatnya pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap tata aturan keprotokolan menjadikan acara dan kegiatan lebih tertib dan sesuai standard dan etika keprotokolan.	Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan mengharuskan penataan kembali dalam hal tata tempat, tata penghormatan, tata upacara serta memerlukan adaptasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
9	Saat ini kelembagaan sudah ada dan terus disesuaikan dengan peraturan perundangan tentang Organisasi Perangkat Daerah	Belum adanya mekanisme tata kerja yang diatur resmi.
10	Adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data yang terintegrasi	Pemanfaatan Aplikasi terpusat baik terkait Perencanaan, Penatausahaan Keuangan, Pelaporan maupun Monitoring dan evaluasi
11	Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan	Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dirumuskan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Sekretariat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kurang optimalnya peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan dukungan mental spiritual	Belum tersusun dan tersosialisasikannya kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
		Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Sosial Kota Blitar
			Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
2	Belum optimalnya kebijakan bidang Ekonomi Kota Blitar	Kurang optimalnya koordinasi terkait bidang perekonomian	Belum tersusunnya peta kebijakan perekonomian Kota Blitar
			Belum adanya Tim Ekonomi Kota Blitar
			Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD
3	Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan	Belum Optimalnya koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah
			Belum Optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Belum tersosialisasikannya penyusunan perencanaan produk hukum daerah	Belum terlaksananya identifikasi, analisis dan pemetaan produk hukum daerah
5	Belum terinternalisasinya reformasi birokrasi	Kurangnya pemahaman terhadap integritas jabatan ASN	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan reformasi birokrasi (8 area perubahan)
6	Belum Optimalnya Kebijakan Program Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya manajemen pelaksanaan program pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
7	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Masih lemahnya perencanaan pengadaan barang/jasa	Belum optimalnya pembinaan kepada pelaku pengadaan barang/jasa
			Belum tercapainya Kematangan UKPBJ level 3
			Belum Optimalnya pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
			Kurang optimalnya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
8	Kurang optimalnya layanan administrasi umum	Kurang optimalnya layanan kerumahtanggaan	Belum terintegrasinya layanan pemanfaatan fasilitas ruang pertemuan dan kendaraan
		Kurang optimalnya layanan penatausahaan	Belum terintegrasinya Pengelolaan layanan surat menyurat secara elektronik
9	Kurang Optimalnya Layanan Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan	Belum optimalnya komunikasi pimpinan dengan media massa	Kurang intensifnya pembinaan terhadap insan media massa
		Belum optimalnya acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	Kurangnya pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan tentang standar keprotokolan
10	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Belum Optimalnya pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan

3.2Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 bahwa Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar adalah

“Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, Bermartabat”

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskankanlah 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- 3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
- 4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- 5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Misi yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah Misi Kesatu yaitu Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan dan Misi Kelima yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daeah Kota Blitar, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi Wali Kota Blitar dapt disajikan melalui Tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar

NO	MISI WALI KOTA BLITAR DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1	Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Kurang optimalnya peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan dukungan mental spiritual	Belum tersusun dan tersosialisasikannya kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat	Peningkatan peran lembaga keagamaan melalui fasilitasi koordinasi Lembaga keagamaan

NO	MISI WALI KOTA BLITAR DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
5	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Sosial Kota Blitar	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan Sosial berjalan dengan baik
			Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
		Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Belum tersusunnya peta kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar	Kooordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan Masyarakat berjalan dengan baik
			Belum dilaksanakannya Evaluasi dan pengukuran Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		Kurang optimalnya koordinasi terkait bidang perekonomian	Belum tersusunnya peta kebijakan perekonomian Kota Blitar	Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan kabupaten/kota disekitar Kota Blitar
			Belum adanya Tim Ekonomi Kota Blitar	
			Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD	Perkembangan kinerja BUMD menuju kearah yang lebih baik
		Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan	Belum Optimalnya koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah	Peraturan perundangan berkenaan telah diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri
			Belum Optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kewilayahan	

NO	MISI WALI KOTA BLITAR DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		Belum tersosialisasikannya penyusunan perencanaan produk hukum daerah	Belum terlaksananya identifikasi, analisis dan pemetaan produk hukum daerah	Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, DPRD maupun dengan Provinsi Jawa Timur
		Kurangnya pemahaman terhadap integritas jabatan ASN	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan reformasi birokrasi (8 area perubahan)	Komitmen tinggi dari personil Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
		Belum Optimalnya manajemen pelaksanaan program pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	
		Masih lemahnya perencanaan pengadaan barang/jasa	Belum optimalnya pembinaan kepada pelaku pengadaan barang/jasa	
			Belum tercapainya Kematangan UKPBJ level 3	
			Belum Optimalnya pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	
			Kurang optimalnya pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	
		Kurang optimalnya layanan kerumahtanggaan	Belum terintegrasinya layanan pemanfaatan fasilitas ruang pertemuan dan kendaraan	
		Kurang optimalnya layanan penatausahaan	Belum terintegrasinya Pengelolaan layanan surat menyurat secara elektronik	
		Belum optimalnya komunikasi pimpinan dengan media massa	Kurang intensifnya pembinaan terhadap insan media massa	

NO	MISI WALI KOTA BLITAR DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
		Belum optimalnya acara daerah yang sesuai standar keprotokolan	Kurangnya pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan tentang standar keprotokolan	
		Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat	Belum Optimalnya pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan	

**3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi
Terkait**

Keterkaitan capaian kinerja yang diinginkan dicapai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah :

Rencana Strategis Kementerian PANRB

Visi Kementerian PANRB Tahun 2020 – 2024 yaitu : “Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Kementerian PANRB yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu :

- 1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik – *digital bureaucracy*
- 2. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel
- 3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani
- 4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Visi Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 yaitu : “Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah Di Bidang Penataan Daerah, Kelembagaan, Kepegawaian Perangkat Daerah, Produk Hukum Daerah, Evaluasi Kinerja dan Otsus/Istimewa”

Misi Ditjen Otonomi Daerah yang terkait dengan kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu :

- 1. Meningkatnya Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah serta Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 2. Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah serta Kualitas Produk Hukum Daerah

Perubahan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yaitu : “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”.

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar yaitu : “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai Prinsip Kebhinekaan”

3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Tabel 3.4.1 sebagai berikut:

Tabel 3.4.1

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Pelayanan Sekretariat Daerah

No.	Rencana Tata Ruang Kota Blitar sesuai Tugas dan	Permasalahan dalam Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-----	---	------------------------------	-------------------	------------------

	Fungsi Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah		
1	Pengembangan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang hubungan antar kawasan	Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	Kurangnya pemahaman OPD bahwa Sekretariat Daerah adalah pengoordinasi kebijakan daerah	Fungsi Sekretariat Daerah sebagai pelayan administratif instansi daerah
2	Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dilaksanakan review kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

3.5.1 Gambaran pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sebagai Organisasi penyusun kebijakan Sekretariat Daerah memegang kunci arah kebijakan Kota Blitar, hal ini tentunya banyak memperoleh hambatan maupun tantangan.

3.5.2 Sasaran jangka menengah pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang relevan dengan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah adalah:

- a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
- b. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah.

3.5.3 Implikasi RTRW bagi pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif sebenarnya tidak memiliki implikasi langsung terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, namun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah

diterbitkan produk hukumnya sehingga pembangunan di Kota Blitar berjalan sesuai koridornya.

3.5.4 Implikasi KLHS bagi pelayanan Sekretariat Daerah

Seperti halnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap pelayanan Sekretariat Daerah tidak memiliki implikasi secara langsung, namun setiap kebijakan yang dikeluarkan harus selalu mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga Pembangunan Kota Blitar akan berwawasan lingkungan guna peningkatan kualitas tata ruang serta peningkatan daya dukung lingkungan.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan isu-isu strategis di Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- a. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
 1. Belum terpenuhinya kebutuhan akan produk hukum yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 2. Belum tersedianya data yang akurat sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan di bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 3. Belum dilaksanakannya evaluasi atas implementasi kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
 4. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat
- b. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
 1. Belum tersedianya roadmap kebijakan bidang perekonomian di Kota Blitar
 2. Belum dilaksanakannya evaluasi atas implementasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan
 3. Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kinerja pengadaan melalui *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- c. Isu terkait Administrasi Umum dan pelayanan publik
 1. Belum terinternalisasinya reformasi birokrasi
 2. Perlunya peningkatan layanan Administrasi Umum diantaranya keprotokolan, kerumahtanggaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Blitar

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Rumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
	TUJUAN:								
I	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80.00	83.60	83.70	83.85	84.00	84.25	84.25
	SASARAN:								
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	TUJUAN:								
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB (72,06)	BB (72,15)	BB (72,20)	BB (72,25)	BB (72,30)	BB (72,35)	BB (72,35)
	SASARAN:								
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	34.48%	55.17%	65.52%	75.86%	86.21%	100.0%	100.0%
	TUJUAN:								

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi (3,3532)	Sangat Tinggi (3,3534)	Sangat Tinggi (3,3536)	Sangat Tinggi (3,3538)	Sangat Tinggi (3,3538)
	SASARAN:								
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	TUJUAN:								
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,39)	BAIK (83,00)	BAIK (83,50)	BAIK (84,00)	BAIK (84,50)	BAIK (85,00)	BAIK (85,00)
	SASARAN:								
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	10.34%	20.69%	27.59%	34.48%	41.38%	48.28%	48.28%
		Nilai rata - rata SKM Setda		BAIK (86,00)	BAIK (87,00)	SANGAT BAIK (88,32)	SANGAT BAIK (89)	SANGAT BAIK (90)	SANGAT BAIK (90)
	TUJUAN:								
IV	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,99)	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	A (90)	A (90)
	SASARAN:								

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	A (83,99)	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	A (90)	A (90)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Blitar sebagaimana tersebut pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT			
MISI: 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Peningkatan Fasilitas dan koordinasi penyusunan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan
MISI: 5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Penguatan pendampingan dan pembinaan OPD dalam Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan Peta Kebijakan Daerah
			Peningkatan Fasilitas dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah
			Peningkatan Fasilitas dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan

			Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD
			Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penguatan pembinaan OPD penyelenggara Pelayanan Publik Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan hasil pemetaan secara keseluruhan program mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Berkenaan dengan perhitungan pagu tahun pertama dan kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar dilakukan dengan menentukan output setiap sub kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output sub kegiatan untuk setiap kegiatan dan program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketiga sampai dengan keenam diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran dengan kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar secara Rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.	
													2022				
													2020	K			Rp
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan							Indikator Tujuan :								
									Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	80	83,6				
									Indikator Sasaran :								
									Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	%	100%	100%				
			4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	%	100%	100%	8.385.988.600	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
			4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumu san Kebija kan	6	6	8.385.988.600	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
			4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Draf rumusan kebijakan bidang keagamaan	Jumlah Draf rumusan kebijakan bidang keagamaan pada tahun n	Draf Rumu san Kebija kan	6	6	8.385.988.600	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
									Jumlah event keagamaan yang terfasilitasi	Jumlah event keagamaan yang terfasilitasi pada tahun n	event	10	10				

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.	
													2022				
													2020	K			Rp
								Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang terfasilitasi	Jumlah guru ngaji dan guru sekolah minggu yang terfasilitasi pada tahun n	Orang	1738	1738					
								Jumlah lembaga kegamaan yang terfasilitasi melalui hibah	Jumlah lembaga kegamaan yang terfasilitasi melalui hibah pada tahun n	Lemba ga	0	5					
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan						Indikator Tujuan :									
								1. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3531)					
								Indikator Sasaran :									
								1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	%	100%	100%					
			4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang pemerintahan x 100%	%	100%	100%	1.292.508.350	Bagian Pemerintahan		
									Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 x 100%	%	50,00%	66,67%				
			4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan yang terfasilitasi / jumlah	%	100%	100%	1.188.325.050	Bagian Pemerintahan		

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
										laporan pelaksanaan tugas pemerintahan keseluruhan x 100%						
								Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan keseluruhan x 100%	%	100%	100%				
								Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan/dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan kelurahan x 100%	%	50%	67%				
								Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah keseluruhan x 100%	%	100%	100%				
			4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah jenis dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Jumlah jenis dokumen laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tersusun pada tahun n	Doku men	3	3	291.685.350	Bagian Pemerintahan	
								Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah jenis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pada tahun n	Koordi nasi	3	3				
								Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah peserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) pada tahun n	Orang	0	500				
			4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah jenis fasilitasi penyelenggaraan administrasi kewilayahan	Jumlah jenis fasilitasi penyelenggaraan administrasi kewilayahan pada tahun n	Fasilit asi	N/A	3	711.355.950	Bagian Pemerintahan	
								Jumlah peserta rakor kewilayahan	Jumlah peserta rakor kewilayahan pada tahun n	Orang	N/A	500				

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.	
													2022				
												2020	K	Rp			
								Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan kelapembi tahun kelurahan yang n	Lemba ga Kemas yaraka tan	3	4					
								Jumlah jenis laporan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada pemanfaatan TTG	Jumlah jenis laporan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada pemanfaatan TTG fasiapada pemanfaatan pehumberdayaan masyarakat pada n	Jenis Lapora n	2	2					
								Jumlah jenis laporan penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah jenis laporan penyelenggaraan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat penyaMasyar rahuan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong n	Jenis Lapora n	2	2					
			4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah jenis dokumen pelaporan pertanggungjawaban yang disusun	Jumlah jenis dokumen pelaporan pertanggungjawaban yang disusun pada tahun n	jenis dokum en	1	1	185.283.750	Bagian Pemerintahan		
									Jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah	Jumlah jenis koordinasi peningkatan kualitas otonomi daerah pada tahun n	jenis koordi nasi	3	3				
			4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rencana kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain pada tahun n x 100%	%	83,33%	83,33%	104.183.300	Bagian Pemerintahan		
			4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti	Jumlah event asosiasi Pemerintah Kota yang diikuti pada tahun n	event	2	2	104.183.300	Bagian Pemerintahan		
									Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	kerjas ama	6	6				

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
									dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain	dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi lain pada tahun n						
			2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Jumlah kelurahan swasembada dibagi jumlah kelurahan se Kota Blitar x 100%	%	23,81%	42,86%	103.562.800	Bagian Pemerintahan	
			2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang pada tahun n	Kelurahan	15	17	103.562.800	Bagian Pemerintahan	
			2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi penyusunan profil	Jumlah kelurahan yang difasilitasi penyusunan profil pada tahun n	Kelurahan	21	21	103.562.800	Bagian Pemerintahan	
			4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Jumlah produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi / jumlah seluruh produk hukum pada tahun n x 100%	%	100%	100%	1.114.798.600	Bagian Hukum	
			4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana / fasilitasi dan koordinasi hukum yang direncanakan x 100%	%	100%	100%	1.114.798.600	Bagian Hukum	
			4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Keputusan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	Jumlah Keputusan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi pada tahun n	SK	250	250	407.397.400	Bagian Hukum	
									Jumlah Peraturan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	Jumlah Peraturan Walikota Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi pada tahun n	Perwali	60	60			
									Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Telah Dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi	Ranperda	10	10			

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.	
													2022				
													2020	K			Rp
										Sinkronisasi pada tahun n							
			4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah permasalahan hukum yang tertangani	jumlah permasalahan hukum yang tertangani pada tahun n	Perma salaha n Huku m	4	4	451.468.500	Bagian Hukum		
									jumlah peserta penyuluhan hukum	jumlah peserta penyuluhan hukum pada tahjun n	Orang	250	200				
			4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah	jumlah peserta sosialisasi produk hukum daerah pada tahun n	Orang	250	250	255.932.700	Bagian Hukum		
									Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan terpublikasi	Jumlah produk hukum yang terdokumentasi dan terpublikasi pada tahun n	Produ k Huku m	70	70				
			4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat x 100%	%	100%	100%	189.531.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
			4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumu san kebija kan	6	4	189.531.000	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
			4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial pada tahun n	Draf Rumu san Kebija kan	3	2	83.542.100	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
												2020	K	Rp		
			4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat pada tahun n	Draf Rumu san Kebija kan	2	2	105.988.900	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
			4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bidang perekonomian x 100%	%	100%	100%	3.447.668.700	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
			4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumu san kebija kan	10	6	1.162.905.300	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
								Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	Jumlah persentase pencapaian kinerja DBHCHT seluruh OPD yang mengampu / jumlah OPD yang mengampu x 100%	%	80%	80%			
			4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang pengelolaan BUMD dan BLUD pada tahun n	Draf Rumu san Kebija kan	0	2	205.360.500	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
			4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Operasi bersama pemberantasan Cukai Ilegal	Jumlah Operasi bersama pemberantasan Cukai Ilegal pada tahun n	Kegiat an	5	5	707.936.600	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
			4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomianan	Jumlah draf rumusan kebijakan bidang perekonomianan pada tahun n	Draf Rumu san Kebija kan	4	4	249.608.200	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
			4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rata-Rata Pencapaian Kinerja DBHCHT	Jumlah persentase pencapaian kinerja DBHCHT seluruh OPD yang mengampu /	%	80%	80%	2.284.763.400	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
												2020	K	Rp		
										jumlah OPD yang mengampu x 100%						
			4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu	Jumlah pelaporan DBHCHT tepat waktu pada tahun n (laporan semester 1 dan laporan semester 2)	Doku men	2	2	2.284.763.400	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
									Jumlah Pemberian BLT kepada Buruh Pabrik Rokok	Jumlah Pemberian BLT kepada Buruh Pabrik Rokok pada tahun n	Orang	0	577			
									Indikator Sasaran :							
									2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	%	100%	100%			
			4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang bidang pembangunan x 100%	%	100%	100%	1.192.214.324	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
									Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	Jumlah pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement / jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa x 100%	%	15,62%	35,00%			
			4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun n	bahan kebija kan	15	10	346.079.404	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
			4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan	Draf Rumu san Kebija kan	6	6	71.983.630	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
									informatika, statistik, persandian, perhubungan, kehutanan dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan	informatika, statistik, persandian, perhubungan, kehutanan dan urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan pada tahun n						
			4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah pada tahun n	Doku men	4	12	274.095.774	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
								Jumlah draf rumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan	Jumlah draf rumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan pada tahun n	Draf Rumu san Kebija kan	0	4				
			4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	SKM Layanan UKPBJ	Hasil Nilai SKMLayanan UKPBJ yang dilaksanakan pada tahun n	Nilai	0	BAIK (81,50)	846.134.920	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
							Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)		Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif) pada tahun n	Nilai	2/9	4/9				
			4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang di fasilitasi	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang di fasilitasi pada tahun n	Paket		80	471.779.050	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
			4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Penyedia) berdasarkan Jenis Pengadaan	Jumlah pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Penyedia) berdasarkan Jenis Pengadaan pada tahun n	Jenis	0	2	52.081.920	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	
			4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	Jumlah Jenis Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan pada tahun n	Jenis		4	322.273.950	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
												2020	K	Rp		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2. Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi						Indikator Tujuan :			Nilai	BB (72,06)	BB (72,15)			
								Indikator Sasaran :								
									Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	%	34,48%	55,17%			
			4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi sesuai standar / jumlah seluruh OPD x 100%	%	34,48%	55,17%	623.427.760	Bagian Organisasi		
			4	01	01	2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	14	20	623.427.760	Bagian Organisasi		
			4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah jabatan yang memenuhi standar jabatan (Anjab, ABK, SKJ dan Evaluasi Jabatan)	Jumlah jabatan yang memenuhi standar jabatan (Anjab, ABK, SKJ dan Evaluasi Jabatan) pada tahun n	Jabata n	1400	1700	256.343.700	Bagian Organisasi	
								Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja	Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja pada tahun n	Kebija kan	2	2				
			4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah jenis Dokumen Penerapan Kinerja Pemda yang disusun	Jumlah jenis Dokumen Penerapan Kinerja Pemda yang disusun pada tahun n	Doku men	2	2	367.084.060	Bagian Organisasi	
								Jumlah OPD sampling evaluasi SAKIP tingkat KemenPAN RB	Jumlah OPD sampling evaluasi SAKIP tingkat KemenPAN RB pada tahun n	OPD	19	23				

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
								Jumlah OPD yang telah menyusun rencana kerja reformasi birokrasi sesuai ketentuan	Jumlah OPD yang telah menyusun rencana kerja reformasi birokrasi sesuai ketentuan pada tahun n	OPD	14	21				
								Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja pada tahun n	OPD	4	6				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik						Indikator Tujuan :								
								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun bersangkutan	Nilai	BAIK (82,39)	BAIK (83,00)				
								Indikator Sasaran :								
								1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	%	10,34%	20,69%				
			4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Jumlah OPD yang memiliki nilai IKM dengan kategori Sangat Baik / jumlah seluruh OPD x 100%	%	10,34%	20,69%	429.368.250	Bagian Organisasi	
			4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	14	20	429.368.250	Bagian Organisasi	
			4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang hasil survey IKM nya berpredikat sangat baik	Jumlah OPD yang hasil survey IKM nya berpredikat sangat baik pada tahun n	OPD	2	6	429.368.250	Bagian Organisasi	
								Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP	Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP pada tahun n	OPD	29	29				
								Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan	Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan pada tahun n	OPD	24	26				
								Jumlah OPD yang telah menyusun proses bisnis	Jumlah OPD yang telah menyusun proses bisnis pada tahun n	OPD	10	20				

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
												2020	K	Rp		
								Jumlah OPD calon peserta kompetisi inovasi pelayanan publik	Jumlah OPD calon peserta kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun n	OPD	4	4				
								Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah OPD yang dievaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun n	OPD	3	6				
								Indikator Sasaran :								
								2. Nilai rata-rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtanggaan + Nilai SKM layanan keprotokolan) / 4	Nilai		BAIK (86,00)				
			4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	12.125.176.151	Bagian Umum		
			4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	%	100%	100%	6.576.000	Bagian Umum		
			4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Doku men	2	2	6.576.000	Bagian Umum		
			4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	%	100%	100%	1.644.000	Bagian Umum		

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
			4	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun n	Doku men	1	1	1.644.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan / rencana jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pada tahun n x 100%	%	100%	100%	84.000.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel pada tahun n	Jenis	1	1	84.000.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	0	0	0	Bagian Umum	
			4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		%	100%	100%	3.350.567.350	Bagian Umum	
			4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia		Jenis	1	1	600.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		Rekeni ng	4	4	1.182.041.950	Bagian Umum	
			4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		Jenis	6	6	81.714.900	Bagian Umum	
			4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia		Orang	60	60	2.086.210.500	Bagian Umum	
			4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar		%	100%	100%	1.412.316.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Pajak kendaraan Jabatan yang terbayarkan pajaknya	Jumlah Pajak kendaraan Jabatan yang terbayarkan pajaknya pada tahun n	Unit	2	2	10.000.000	Bagian Umum	

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
								Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara pada tahun n	Unit	21	21	347.325.200	Bagian Umum	
									Jumlah Pajak kendaraan dinas Operasional yang terbayarkan pajaknya	Jumlah Pajak kendaraan dinas Operasional yang terbayarkan pajaknya pada tahun n	Unit	65	65			
			4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun n	Unit	2	2	763.800.000	Bagian Umum	
									Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Jumlah rumah dinas yang terpelihara pada tahun n	Unit	2	2			
			4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair) pada tahun n	Jenis	12	12	291.190.800	Bagian Umum	
			4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100%	100%	930.262.414	Bagian Umum	
			4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun n	Doku men	12	12	178.952.314	Bagian Umum	
			4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan	Jenis	23	23	145.310.100	Bagian Umum	

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
								Wakil Kepala Daerah		Wakil Kepala Daerah pada tahun n						
			4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi pada tahun n	Fasilitasi	2	2	6.000.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun n	Jenis	2	2	600.000.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Jumlah fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di laksanakan / jumlah seluruh fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100%	100%	4.070.464.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang terfasilitasi pada tahun n	Fasilitasi	23	4	2.064.579.200	Bagian Umum	
			4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Tugas/Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi pada tahun n	Fasilitasi	23	4	1.470.689.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang terfasilitasi pada tahun n	Fasilitasi	12	12	535.195.800	Bagian Umum	
			4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP / jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan	%	80%	80%	2.251.346.587	Bagian Umum	

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
												2020	K	Rp		
										Komunikasi Pimpinan pada tahun n x 100%						
			4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitas upacara sesuai standar keprotokolan	Jumlah fasilitas upacara sesuai standar keprotokolan pada tahun n	Upacar a	9	9	2.009.568.590	Bagian Umum	
									Jumlah penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan	Jumlah penerimaan tamu daerah sesuai standar keprotokolan pada tahun n	peneri maan	24	24			
			4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Naskah Sambutan Pimpinan Daerah Yang disusun	Jumlah Naskah Sambutan Pimpinan Daerah Yang disusun pada tahun n	Naska h	400	400	115.321.400	Bagian Umum	
			4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Baliho	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Baliho pada tahun n	Unit	25	25	126.456.597	Bagian Umum	
									Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Foto	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Foto pada tahun n	Unit	3000	3000			
									Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Spanduk	Jumlah Dokumentasi kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah: Spanduk pada tahun n	Unit	30	30			
			4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100%	100%	17.999.800	Bagian Umum	
			4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun pada tahun n	Doku men	1	1	17.999.800	Bagian Umum	
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah							Indikator Tujuan :							
									Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (83,99)	A (86)			
									Indikator Sasaran :							

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
												2022				
			2020	K	Rp											
								Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai	A (83,99)	A (86)				
			4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Nilai SKM layanan internal Setda yang dilaksanakan pada tahun n			BAIK (86,00)	12.002.610.881	Bagian Organisasi dan Bagian Umum	
			4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu / jumlah seluruh dokumen perencaaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100%	100%	99.993.600	Bagian Organisasi	
			4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA) pada tahun n	Doku men	7	10	48.367.600	Bagian Organisasi	
			4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal, Renaksi dan Monev Renaksi)	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal, Renaksi dan Monev Renaksi) pada tahun n	Doku men	2	7	51.626.000	Bagian Organisasi	
			4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian / jumlah seluruh aparatur perangkat daerah x 100%	%	100%	100%	90.890.200	Bagian Organisasi	
			4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar	event	5	5	90.890.200	Bagian Organisasi	

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
								Perundang- Undangan		nasional yang diikuti pada tahun n						
								Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian tahun n	Orang	0	84				
			4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh ketersediaan administrasi umum perangkat daerah x 100%	%	100%	100%	1.667.800.900	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	25	25	79.531.400	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	Jenis	2	3	238.507.400	Bagian Umum	
									Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun n	Jenis	0	5			
			4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	23	23	31.791.500	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun n	Dos	0	2950	526.480.700	Bagian Umum	
									Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia pada tahun n	Porsi	0	2188			
									Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun n	Jenis	45	51			
			4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun n	Jenis	16	16	77.651.900	Bagian Umum	
								Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun n	Lemba r	50000	50000				

NO.	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kondisi Awal	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Penanggungjawa b	KET.
													2022			
													2020	K		
			4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun n	Jenis	2	2	47.400.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia pada tahun n	Dos	2165	0	666.438.000	Bagian Umum	
									Jumlah porsi mamin yang tersedia	Jumlah porsi mamin yang tersedia pada tahun n	Porsi	3109	0			
									Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun n	Rakor	130	130			
			4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100%	100%	10.143.926.181	Bagian Umum	
			4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun n	Lapora n	12	12	10.132.990.281	Bagian Umum	
			4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran) pada tahun n	Doku men	4	4	10.935.900	Bagian Umum	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Blitar
Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penanggg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan							Indikator Tujuan :																
									Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	Indeks	80	83,7		83,85		84		84,25		84,25				
									Indikator Sasaran :																
									Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan dibagi jumlah seluruh kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100 %	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan x 100%	%	100 %	100%	9.972.553.403	100%	10.072.278.937	100%	10.173.001.726	100%	10.274.731.743	100%	40.492.565.808	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	
			4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumus an Kebijak an	6	6	9.972.553.403	6	10.072.278.937	6	10.173.001.726	6	10.274.731.743	6	40.492.565.808	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	
			4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada tahun bersangkutan	Dokum en	25	25	9.972.553.403	25	10.072.278.937	25	10.173.001.726	25	10.274.731.743	25	40.492.565.808	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	Meningk atnya akuntab ilitas kinerja pemerin tahan daerah	1. Terwujud nya penyeleng garaan pemerinta han dan administr asi pembang unan						Indikator Tujuan:																
									1. Status EKPPD	Penilaian atas Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah oleh Kemendagri	Nilai	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3532)		Sangat Tinggi (3,3534)		Sangat Tinggi (3,3536)		Sangat Tinggi (3,3538)		Sangat Tinggi (3,3538)			
									Indikator Sasaran :															
									1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasi kan	Jumlah Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasi kan dibagi jumlah seluruh kebijakan bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat x 100 %	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang pemerintahan x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		4.540.733.633	Bagian Pemerin tahan	
									Persentase lembaga kemasyarakata n kelurahan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakata n kelurahan yang dilaksanakan pembinaan dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakata n kelurahan sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 x 100%	%	50,0 0%	83,3 3%		100 %		100 %		100 %		100 %				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan keseluruhan x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		4.113.477.398	Bagian Pemerin tahan	
									Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas kewilayahan keseluruhan x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %						
									Persentase lembaga kemasyarakata n kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	Jumlah lembaga kemasyarakata n kelurahan yang dilaksanakan pembinaan/de ngan jumlah seluruh lembaga kemasyarakata	%	50%	83%		100 %		100 %		100 %		100 %				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										n kelurahan x 100%														
									Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	Jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi / jumlah laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah keseluruhan x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
			4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan pada tahun bersangkutan	Dokum en	7	10	294.602.204	10	297.548.226	10	300.523.708	10	303.528.945	1.196.203.082	Bagian Pemerin tahan		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan pada tahun bersangkutan	Dokum en	N/A	5	718.469.510	5	725.654.205	5	732.910.747	5	740.239.854	5	2.917.274.316	Bagian Pemerin tahan	
			4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun bersangkutan	Dokum en	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Bagian Pemerin tahan	
			4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lemba ga/ Instansi lain yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rencana kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lemba ga/ Instansi lain pada tahun n x 100%	%	83,33%	83,33%	105.225.133	83,33%	106.277.384	83,33%	107.340.158	83,33%	108.413.560	83,33%	427.256.235	Bagian Pemerin tahan	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
												2023		2024		2025		2026					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			01	02	01	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri pada tahun bersangkutan	Dokum en	8	8	105.225.133	8	106.277.384	8	107.340.158	8	108.413.560	8	427.256.235	Bagian Pemerin tahan	
			2	04	13		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	Jumlah kelurahan swasembada dibagi jumlah kelurahan se Kota Blitar x 100%	%	23,81%	57,14%	104.598.428	71,43%	105.644.412	85,71%	106.700.856	100%	107.767.865	100%	424.711.562	Bagian Pemerin tahan	
			2	04	13	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang pada tahun n	Kelura han	15	18	104.598.428	19	105.644.412	20	106.700.856	21	107.767.865	21	424.711.562	Bagian Pemerin tahan	
			2	04	13	2.01	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada tahun bersangkutan	Dokum en	21	21	104.598.428	21	105.644.412	21	106.700.856	21	107.767.865	21	424.711.562	Bagian Pemerin tahan	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T		
													2023		2024		2025		2026							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	Jumlah produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi / jumlah seluruh produk hukum pada tahun n x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		4.571.794.644	Bagian Hukum		
			4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	Jumlah fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana / fasilitasi dan koordinasi hukum yang direncanakan x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		4.571.794.644	Bagian Hukum		
			4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun pada tahun bersangkutan	Dokum en	320	320		320		320		320		320		423.939.368	1.670.738.778	Bagian Hukum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum pada tahun bersangkutan	Kasus	4	4	455.983.185	4	460.543.017	4	465.148.447	4	469.799.931	4	1.851.474.580	Bagian Hukum	
			4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi pada tahun bersangkutan	Dokum en	70	70	258.492.027	70	261.076.947	70	263.687.717	70	266.324.594	70	1.049.581.285	Bagian Hukum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa l	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T		
													2023		2024		2025		2026							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti / jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		777.267.581	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat		
			4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumus an kebijak an	6	4		4		4		4		4		197.226.719	777.267.581	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T			
													2023		2024		2025		2026								
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun bersangkutan	Dokum en	3	2		2		2		2		2		2		342.606.571	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	
															84.377.521		85.221.296		86.073.509		86.934.244						

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas pada tahun bersangkutan	Dokum en	2	2		2		2		2		2		434.661.010	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	
			4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bidang perekonomian x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		4.769.080.461	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun n	Rumus an kebijak an	10	6	1.174.534.353	6	1.186.279.697	6	1.198.142.493	6	1.210.123.918	6	4.769.080.461	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	
			4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD pada tahun bersangkutan	Dokum en		2	207.414.105	2	209.488.246	2	211.583.129	2	213.698.960	2	842.184.439	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	
			4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada tahun bersangkutan	Lapora n		2	715.015.966	2	722.166.126	2	729.387.787	2	736.681.665	2	2.903.251.543	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T			
													2023		2024		2025		2026								
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil pada tahun bersangkutan	Dokum en	4	4		4		4		4		4		1.023.644.479	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat			
			4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti pada tahun n	Dokum en		2		2		2		2		2						
			4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja pada tahun bersangkutan	Dokum en	2	2		2		2		2		2		2		9.369.826.150	Bagian Perekon omian dan Kesejaht eraan Rakyat	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								Indikator Sasaran :																
								2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasi kan	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasi kan/ Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rumusan kebijakan bidang bidang pembangunan x 100%	%	100 %	100 %	1.204.138.413	100 %	1.216.179.797	100 %	1.228.341.595	100 %	1.240.625.011	100 %	4.889.284.814	Bagian Layanan Pengada an Barang/ Jasa	
									Persentase pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Procurement</i>	Jumlah pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement / jumlah seluruh pengadaan	%	15,6 2%	50,0 0%		63,3 3%		76,6 7%		90,0 0%		90,0 0%			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													2023		2024		2025		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										barang dan jasa x 100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif) pada tahun n	Nilai	2/9	5/9		6/9		7/9		9/9		9/9				
			4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun bersangkutan	Dokum en		80	476.496.841	80	481.261.809	80	486.074.427	80	490.935.171	80	1.934.768.248	Bagian Layanan Pengada an Barang/ Jasa	
								Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada tahun bersangkutan	Dokum en	0	2	52.602.739	2	53.128.767	2	53.660.054	2	54.196.655	2	213.588.215	Bagian Layanan Pengada an Barang/ Jasa	
			4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun bersangkutan	Orang		300	325.498.053	300	328.753.034	300	332.040.564	300	335.360.970	300	1.321.652.620	Bagian Layanan Pengada an Barang/ Jasa	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
	Meningk atnya akuntab ilitas kinerja pemerin tahan daerah	2. Terwujud nya internalis asi kinerja organisasi						Indikator Tujuan :																
								2. Nilai SAKIP	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN RB	Nilai	BB (72, 06)	BB (72, 20)		BB (72, 25)		BB (72, 30)		BB (72, 35)		BB (72, 35)				
								Indikator Sasaran :																
								Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Jumlah OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dibagi jumlah seluruh OPD x 100%	%	34,4 8%	65,5 2%		75,8 6%		86,2 1%		100 %		100 %				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	Jumlah OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi sesuai standar / jumlah seluruh OPD x 100%	%	34,4 8%	65,5 2%	629.512.038	75,8 6%	635.657.158	86,2 1%	641.863.730	100 %	648.132.367	100 %	2.555.165.292	Bagian Organis asi	
			4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	14	22	629.512.038	24	635.657.158	26	641.863.730	30	648.132.367	30	2.555.165.292	Bagian Organis asi	
			4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada tahun bersangkutan	Dokum en	6	6	258.907.137	6	261.496.208	6	264.111.170	6	266.752.282	6	1.051.266.798	Bagian Organis asi	

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
								1. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Jumlah OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM pada tahun bersangkutan / Jumlah OPD x 100%	%		10,34%	27,59%		34,48%		41,38%		48,28%		48,28%			
			4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	Jumlah OPD yang memiliki nilai IKM dengan kategori Sangat Baik / jumlah seluruh OPD x 100%	%	10,34%	27,59%		34,48%		41,38%		48,28%		48,28%	1.758.164.712	Bagian Organis asi	
			4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada tahun n	OPD	14	22		24		26		30		30	1.758.164.712	Bagian Organis asi	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T		
													2023		2024		2025		2026							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada tahun bersangkutan	Lapora n	6	5		5	406.896.933	5	410.965.902	5	415.075.561	5	419.226.316	5	1.652.164.712	Bagian Organis asi	
			4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada tahun bersangkutan	Dokum en	2	3		3	26.500.000	3	26.500.000	3	26.500.000	3	26.500.000	3	106.000.000	Bagian Organis asi	
									Indikator Sasaran :																	
									2. Nilai rata- rata SKM Setda	(Nilai SKM layanan surat menyurat dan arsip + Nilai SKM layanan sarana dan prasarana + Nilai SKM layanan kerumahtangg aan + Nilai SKM layanan keprotokolan) / 4	Nilai			BAIK (87,00)		SANGAT BAIK (88,32)		SANGAT BAIK (89)		SANGAT BAIK (90)		SANGAT BAIK (90)				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketent uan yang berlaku	Jumlah Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketent uan yang berlaku dibagi jumlah seluruh Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah pada tahun n x 100%	%	100%	100%	12.155.625.913	100%	12.286.505.172	100%	12.408.543.223	100%	12.531.801.656	100%	49.382.475.963	Bagian Umum	
			4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	Jumlah BMD pada PD yang dikelola sesuai standar / jumlah seluruh BMD yang ada pada PD x 100%	%	100 %	100 %	9.341.760	100 %	9.408.178	100 %	9.475.259	100 %	9.543.012	100 %	37.768.209	Bagian Umum	
			4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada tahun bersangkutan	Dokum en	0	2	1.600.000	2	1.600.000	2	1.600.000	2	1.600.000	2	6.400.000	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T			
													2023		2024		2025		2026								
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD pada tahun bersangkutan	Lapora n	0	2		2		2		2		2		2		4.400.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun bersangkutan	Lapora n	2	2		2		2		2		2		6.843.012	26.968.209	Bagian Umum		
			4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang diterima pada tahun n / jumlah target Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada tahun n x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		1.710.753	6.742.052	Bagian Umum		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T		
													2023		2024		2025		2026							
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
			4	01	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada tahun bersangkutan	Dokum en	1	1		1	1.660.440	1	1.677.044	1	1.693.815	1	1.710.753	1	6.742.052	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan / rencana jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pada tahun n x 100%	%	100 %	100 %		100 %	84.840.000	100 %	95.688.400	100 %	96.545.284	100 %	97.410.737	100 %	374.484.421	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	2	300.000.000	2	300.000.000	Bagian Umum			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
												2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	1	1		1		1		1		87.410.737	1	344.484.421	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Bagian Umum	
			4	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Bagian Umum		
			4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0		0	0	0		0		0		Bagian Umum		
			4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	10		10		10		10		30.000.000	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
			4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar / rencana jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pada tahun n x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	13.411.792.887	Bagian Umum		
			4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada tahun bersangkutan	Lapora n	1	1		1		1		1		1	2.460.603	Bagian Umum		
			4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Lapora n	0	48		48		48		48		48	1.230.037.593	4.847.559.959	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Lapora n	6	6	82.532.049	9	83.357.369	9	84.190.943	9	85.032.853	9	335.113.214	Bagian Umum	
			4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Lapora n	0	13	2.026.070.605	13	2.046.331.311	13	2.066.794.624	13	2.087.462.570	13	8.226.659.111	Bagian Umum	
			4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar / jumlah seluruh Barang Milik Daerah x 100%	%	100 %	100 %	1.426.439.160	100 %	1.440.053.552	100 %	1.453.754.087	100 %	1.467.591.628	100 %	5.787.838.427	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
			4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pada tahun bersangkutan	Unit	2	2		2		2		2		2		41.010.050	Bagian Umum	
			4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun bersangkutan	Unit	65	65		65		65		65		65		1.409.231.885	Bagian Umum	
			4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	1		1		1		1		5.000.000	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T				
													2023		2024		2025		2026									
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Umum			
			4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Umum			
			4	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	Unit	0	1		35.000.000	1		35.000.000	1		35.000.000	1		35.000.000	1	140.000.000	Bagian Umum	
			4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	2	4		736.438.000	4		743.802.380	4		751.240.404	4		758.752.808	4	2.990.233.592	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
			4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	12	40		40		40		40		40		1.072.362.900	Bagian Umum	
			4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi pada tahun bersangkutan	Unit	0	10		10		10		10		10		120.000.000	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	3.815.010.820	Bagian Umum		
			4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	orang/ bulan	2	2		2		2		2		2	186.218.496	733.884.336	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T		
													2023		2024		2025		2026							
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
			4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	23	23		23		23		23		23		595.917.448	Bagian Umum		
			4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	Orang	2	2		2		2		2		2		24.606.030	Bagian Umum		
			4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun bersangkutan	orang/ bulan	2	2		2		2		2		2		624.362.406	2.460.603.006	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T		
													2023		2024		2025		2026							
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtangg aan Sekretariat Daerah yang di laksanakan	Jumlah fasilitasi kerumahtangg aan Sekretariat Daerah yang di laksanakan / jumlah seluruh fasilitasi kerumahtangg aan Sekretariat Daerah yang seharusnya ada x 100%	%	100	100		100		100		100		100		16.692.993.257	Bagian Umum		
			4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	23	4		4	2.085.224.992	4	2.106.077.242	4	2.127.138.014	4	2.148.409.394	4	8.466.849.643	Bagian Umum	
			4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	23	4		4	1.485.395.890	4	1.500.249.849	4	1.515.252.347	4	1.530.404.871	4	6.031.302.957	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	12	12	540.547.758	12	545.953.236	12	551.412.768	12	556.926.896	12	2.194.840.657	Bagian Umum	
			4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP / jumlah Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan pada tahun n x 100%	%	80	80	2.261.360.053	80	2.283.973.653	80	2.306.813.390	80	2.329.881.524	80	9.182.028.620	Bagian Umum	
			4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan pada tahun bersangkutan	Lapora n	0	33	2.029.664.276	33	2.049.960.919	33	2.070.460.528	33	2.091.165.133	33	8.241.250.856	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
			4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan pada tahun bersangkutan	Lapora n	400	400		400		400		400		400		472.933.639	Bagian Umum	
			4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumenta sian Tugas Pimpinan pada tahun bersangkutan	Lapora n	305 5	305 5		305 5		305 5		305 5		305 5		467.844.125	Bagian Umum	
			4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100	100		100		100		100		100		73.817.270	Bagian Umum	

[illegible]

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T	
													2023		2024		2025		2026						
			2020	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
								Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	Nilai		A (83, 99)	A (87)		A (88)		A (89)		A (90)		A (90)				
			4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Nilai SKM layanan internal Setda yang dilaksanakan pada tahun n				BAIK (87,00)	12.122.636.990	SANGAT BAIK (88,32)	12.243.863.360	SANGAT BAIK (89)	12.366.301.993	SANGAT BAIK (90)	12.489.965.013	SANGAT BAIK (90)	49.222.767.356	Bagian Organis asi dan Bagian Umum	
			4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu / jumlah seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan yang seharusnya ada x 100%	%	100	100		100		100		100		100		410.074.255	Bagian Organis asi	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T					
													2023		2024		2025		2026										
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp				
			4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	Dokum en	7	10		48.851.276	10		49.339.789	10		49.833.187	10		50.331.519	10		198.355.770	Bagian Organis asi	
			4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	Dokum en	2	6		52.142.260	6		52.663.683	9		53.190.319	9		53.722.223	9		211.718.485	Bagian Organis asi	
			4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian / jumlah seluruh aparatur perangkat daerah x 100%	%	100	100		91.799.102	100		92.717.093	100		93.644.264	100		94.580.707	100		372.741.166	Bagian Organis asi	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan pada tahun bersangkutan	Paket	0	6		9	40.000.000	9	40.400.000	9	41.212.040		162.416.040	Bagian Organisasi	
			4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun bersangkutan	orang	0	84		84	51.799.102	84	52.317.093	84	53.368.667	84	210.325.126	Bagian Organisasi	
			4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh ketersediaan administrasi umum perangkat daerah x 100%	%	100	100		100	1.684.478.909	100	1.701.323.698	100	1.735.520.304	100	6.839.659.847	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	0	1	80.326.714	1	81.129.981	1	81.941.281	1	82.760.694	1	326.158.670	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	0	7	240.892.474	7	243.301.399	7	245.734.413	7	248.191.757	7	978.120.042	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	0	3	32.109.415	3	32.430.509	3	32.754.814	3	33.082.362	3	130.377.101	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	0	170	531.745.507	170	537.062.962	170	542.433.592	170	547.857.928	170	2.159.099.988	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Paket	0	2	78.428.419	2	79.212.703	2	80.004.830	2	80.804.879	2	318.450.831	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	Dokum en	0	24	47.874.000	24	48.352.740	24	48.836.267	24	49.324.630	24	194.387.637	Bagian Umum	
			4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun bersangkutan	Lapora n	0	130	673.102.380	130	679.833.404	130	686.631.738	130	693.498.055	130	2.733.065.577	Bagian Umum	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUA N	Kon disi Awa 1	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Unit Kerja Penangg ung jawab	K E T
													2023		2024		2025		2026					
													2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
			4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar / jumlah seluruh pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	%	100	100		100		100		100		100	41.600.292.089	Bagian Umum	
			4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun bersangkutan	orang/ bulan	84	84		84		84		84		84	41.555.443.909	Bagian Umum	
			4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/ Semesteran SKPD pada tahun bersangkutan	Lapora n	4	4		4		4		4		4	44.848.181	Bagian Umum	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat disajikan dalam table 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,50	83,60	83,70	83,85	84,00	84,25	84,25
2	Nilai SAKIP	BB (72,06)	BB (72,15)	BB (72,20)	BB (72,25)	BB (72,30)	BB (72,35)	BB (72,35)
3	Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3527)	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi (3,3532)	Sangat Tinggi (3,3534)	Sangat Tinggi (3,3536)	Sangat Tinggi (3,3538)	Sangat Tinggi (3,3538)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK (82,39)	BAIK (83,00)	BAIK (83,50)	BAIK (84,00)	BAIK (84,50)	BAIK (85,00)	BAIK (85,00)
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,99)	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	A (90)	A (90)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi	Persen	34,48	55,17	65,52	75,86	86,21	100	100
2.	Persentase kebijakan pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kebijakan administrasi pembangunan dan umum yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam Perubahan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Blitar pada setiap tahunnya dan dilaksanakan pelaporannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kota Kota Blitar agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.